

PEMETAAN PROFIL BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sufi Jikrillah

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat
Jalan H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin

Abstract: Bank Perkreditan Rakyat is bank accepting saving only in the form of time deposit, other form saving that likened with and allocation fund as effort BPR. BPR purpose to support national development in frame work to improving generalization, economic growth and stability of national to improvement of publics prosperity. Purpose of this research is to know generality condition, human resource structure, structure of finance balance, condition of competition and condition of eksternal of BPR Regency of HSU. Result of this research conclude that from two sampel BPR all chosening near by location with market or economic activity in subdistrict region. Quality of human resource which not yet adequate, either in level of manajerial and also operational cause height expense of overhead in operational of BPR. Height rate of interest credit of BPR because expense of overhead together with fund expense (cost of funds), really is not represent constraint meaning to all debtor of BPR. This matter is proven with increasing debtor of BPR during 2 the last year. There are preference change behavior of client BPR having the character of emotional market that is loyalty customer having strong emotional with BPR caused according to social characteristic become more rational market calculate on profit or loss in transacting with BPR. The mentioned pushing increasing good competition between BPR and also with Bank Umum so that progressively complicate BPR in funding and pushing higher cost of funds BPR. Competition faced by BPR come from the other BPR, Micro Financial Institution like BMT and also with Bank Umum with having small unit or branch in rural area.

Keywords: profile of Bank Perkreditan Rakyat

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat merupakan komponen kunci dalam memajukan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Birokrasi rumit yang biasanya menjadi hambatan utama UMKM dalam memperoleh akses pendanaan, banyak didapatkan solusinya melalui layanan Bank Perkreditan Rakyat. Proses layanan kredit yang sederhana dan mudah, membuat Bank Perkreditan Rakyat makin dipercaya oleh pelaku UMKM. Peran penting yang dilakoni Bank Perkreditan Rakyat terhadap UMKM ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjadikan usaha menengah kecil dan mikro sebagai ujung tombak pertumbuhan perekonomian nasional.

Sehubungan dengan perannya yang sangat strategis dan berbeda dengan perbankan secara umum, maka industri Bank Perkreditan Rakyat dengan tingkat efisiensi yang tinggi sangat diperlukan karena mempunyai dampak positif terhadap sektor-sektor lainnya. Bank Perkreditan Rakyat yang kurang efisien akan tersingkir dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan kompetitornya, baik dari segi harga (*pricing*) maupun dalam hal kualitas produk dan pelayanannya. Bank Perkreditan Rakyat yang seperti ini akan mengalami kesulitan baik dalam hal mempertahankan nasabahnya maupun dalam menarik nasabah-nasabah baru untuk memperbesar *customer basenya*. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sasaran Bank Perkreditan Rakyat ialah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank untuk daerah-daerah perdesaan atau pengusaha gurem yang sifat usahanya melayani sektor informal di kota-kota kabupaten, kecamatan dan daerah perdesaan. Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat umumnya, bentuk Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan di kabupaten Kotabaru, sekaligus sebagai lembaga keuangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Di Indonesia setelah melalui pembaharuan undang-undang perbankan yang cukup panjang, maka dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian tersebut mencerminkan dua peran bank sekaligus baik sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) maupun sebagai *institute of economic development* (Abdullah, 2003,17).

Mengingat bahwa bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998: "Bank

wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara periodik bank-bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan dan kinerjanya. Bank-bank dituntut transparan dengan kewajiban untuk menyediakan informasi kepada pihak nasabah baik yang berhubungan transaksi yang dilakukan oleh nasabah ataupun informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank. Sehingga kinerja perbankan dapat diketahui oleh segala pihak yang berkepentingan dengan bank yang bersangkutan.

Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kondisi bank melalui laporan keuangan yang dibuat oleh suatu bank. Menurut Muljono (1995,9) karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sudah tentu mereka akan memberikan tekanan-tekanan analisis pendekatan-pendekatan maupun cara-cara analisis yang berbeda beda pula, sesuai dengan sifat dan kepentingan masing-masing.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada internal maupun bagi pihak eksternal bank.

METODE PENELITIAN

Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi sampel penelitian ditetapkan berdasarkan *random sampling* sehingga terpilih dua Bank Perkreditan Rakyat yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan. Responden masing-masing Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari direktur, pemilik (pemegang saham pengendali) dan komisaris Bank Perkreditan Rakyat. Untuk nasabah ditetapkan 5 (lima) nasabah pada tiap Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari penyimpan dana dan debitur kredit. Pesaing Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan minimal 1 (satu) lembaga keuangan dapat berupa bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan pembiayaan (*leasing, multifinance* atau lainnya) atau lembaga keuangan mikro (koperasi, BMT atau lainnya) yang ditetapkan berdasarkan persepsi atau pendapat BPR mengenai pesaing utama di wilayah operasionalnya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek kondisi keadaan umum, aspek sumber daya manusia, aspek struktur neraca keuangan, dan aspek kondisi persaingan atau kondisi eksternal. Sumber data dalam bentuk data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari data laporan keuangan dan data struktur organisasi masing-masing Bank Perkreditan Rakyat di kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan data primer ini akan dikumpulkan dengan melakukan wawancara (*in depth interview*) dengan direktur Bank Perkreditan Rakyat, nasabah dan pesaing.

HASIL PEMBAHASAN

Struktur Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak direktur diperoleh fakta dan data tentang kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, baik ditingkat manajerial maupun teknis operasional menyebabkan tingginya biaya overhead dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat. Biaya overhead ini bersama-sama dengan biaya dana (*cost of funds*) merupakan penyumbang terbesar terhadap ting-

ginya suku bunga kredit Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini juga terjadi pada PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusianya, PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan telah mengikutsertakan karyawannya dalam pelatihan-pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pada Bank Perkreditan Rakyat ini sudah mulai memikirkan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi Bank Perkreditan Rakyat masih memiliki sumber daya manusia yang rendah karena tidak adanya standar dalam sistem rekrutmen, jenjang karir yang tidak jelas, serta kurangnya upaya peningkatan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat tidak memadai dan tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan tingginya biaya operasional dan rendahnya tingkat keuntungan, dan juga pelaksanaan operasional yang tidak efisien. Sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan kurangnya profesionalisme.

Dalam penentuan tingkat gaji pengurus, semua Bank Perkreditan Rakyat sampel menjawab honor yang diterima direksi dan komisaris berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), sedangkan untuk penentuan gaji karyawan berdasarkan keputusan dari direksi. Penentuan gaji ini berdasarkan peran dan tanggungjawab pekerja selain itu, juga ditambah dari hasil laba perusahaan (Bank Perkreditan Rakyat) selama 1 (satu) tahun berjalan.

Struktur Neraca Keuangan

Dilihat dari sosial ekonomi PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan yang berlokasi di kecamatan Alabio dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan yang berlokasi di kecamatan Amuntai Selatan khususnya dan kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya, memperlihatkan kondisi ekonomi yang kurang baik, hal ini disebabkan karena naiknya harga sembako (harga barang me-

ningkat) dan semakin ketatnya pemerintah mengawasi industri perikanan.

Perekonomian yang tidak stabil menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, pasar menjadi lesu dan pada akhirnya menurunkan tingkat pendapatan masyarakat terutama yang bergerak di sektor perdagangan dan sektor pertanian. Hal yang sama juga dirasakan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan.

Walaupun secara umum struktur pendanaan Bank Perkreditan Rakyat tidak selalu didukung oleh permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam penghimpunan dana masyarakat sehingga Bank Perkreditan Rakyat membatasi biaya operasional untuk mencapai skala ekonomis yang diharapkan, akan tetapi untuk Bank Perkreditan Rakyat yang dijadikan responden pada penelitian ini, pendapat tersebut tidak berpengaruh nyata.

Tingginya tingkat suku bunga kredit Bank Perkreditan Rakyat yang disebabkan oleh biaya overhead bersama-sama dengan biaya dana (*cost of funds*), ternyata bukanlah merupakan kendala yang berarti bagi para debitur Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini terbukti dengan besarnya peningkatan jumlah debitur pada Bank Perkreditan Rakyat sampel selama 2 (dua) tahun terakhir.

Kondisi Persaingan

1. Inovasi Dibidang Pemasaran

PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan belum mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dan meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan Bank Perkreditan Rakyat lainnya. Hal ini disebabkan karena umumnya Bank Perkreditan Rakyat memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Teknologi Informasi

PD Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pandan dan PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan sampai saat ini belum me-

iliki perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sementara itu terdapat Bank Perkreditan Rakyat yang telah memiliki perangkat komputer namun tidak mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya.

Keterbatasan teknologi informasi ini menyebabkan Bank Perkreditan Rakyat tidak memiliki kemampuan akses terhadap informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun dari ekstern, sehingga Bank Perkreditan Rakyat tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh lemahnya jaringan bisnis Bank Perkreditan Rakyat sehingga tidak terjadi sinergi untuk menciptakan sistem dan prosedur yang baik bagi anggota-anggota jaringan tersebut. Saat ini, walaupun dengan tingkat implementasi dan utilisasi yang berbeda-beda, bisa dikatakan belum ada Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan teknologi informasi secara maksimal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kondisi Eksternal

Persaingan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat berasal dari sesama Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti BMT maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha kecil atau cabang di daerah pedesaan. Bank-bank ini memiliki status yang jelas, jaringan luas, berteknologi tinggi, mempunyai bagian riset dan pengembangan dengan jumlah modal yang besar. Dari 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat sampel, semua menyatakan tingkat persaingan dalam kategori sedang.

Ada satu Bank Perkreditan Rakyat yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat Amuntai Selatan yang memiliki pesaing yaitu program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang menyalurkan pinjaman dana bergulir dengan proses mudah, cepat dan tanpa agunan. Sehingga tidak ada sangsi apabila tidak dikembalikan.

Rekomendasi Kebijakan

1. *Ownership and Governance*

Kepemilikan yang terkait langsung dengan pengelolaan usaha merupakan hal yang paling mendasar dalam menentukan keberhasilan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini, manajemen dituntut untuk bertindak profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pemilik dalam mengelola kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pengelola wajib mengelola usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Otoritas.

2. *Good Management*

Industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat ditandai pula oleh tersedianya sumber daya manusia profesional yang didukung oleh kebijakan pengembangan SDM yang baik. Manajemen Bank Perkreditan Rakyat yang profesional akan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang ada. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia yang baik akan meliputi prosedur rekrutmen pegawai untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang layak (*qualified*), adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang teratur serta berorientasi pada kebutuhan nasabah (didukung oleh *customer information system*). Aplikasi *good management* membutuhkan *information technology* (IT) yang memadai sehingga Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat beroperasi lebih efisien, transparan dan *accountable*.

3. *Viability*

Yang sangat prinsip dalam hal ini adalah *economic* dan *funding viability*, yang ditunjukkan oleh beberapa rasio seperti NPL yang rendah dan efisiensi usaha yang tinggi untuk mencapai profitabilitas optimum. Untuk mencapai hal ini, Bank Perkreditan Rakyat wajib meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan menghemat biaya operasional. Dari sisi pendanaan, porsi tabungan dalam struktur dana pihak ketiga (DPK) Bank Perkreditan Rakyat saat ini perlu ditingkatkan untuk mencapai pendanaan yang sehat dan mengurangi risiko likuiditas. Selain itu, perlu dipenuhi prinsip *economic of scale* sehingga perlu terus diupayakan tambahan modal yang memadai.

4. *Customer Orientation*

Perlu dirancang jasa keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan produk-produk yang inovatif. Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya merupakan *face to face organization*, bersifat *member base*, sehingga perlu pelayanan jemput bola atas simpanan dan pinjaman yang lebih baik.

5. Pengawasan dan pembinaan dari KBI

Pengawasan dan pembinaan dari KBI juga merupakan hal pokok yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip-prinsip *prudensial* yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan *law enforcement* pengawasan yang belum efektif. Mengingat pengawasan lembaga keuangan mikro merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus menerus.

6. Penguatan Industri Bank Perkreditan Rakyat

Keberadaan industri Bank Perkreditan Rakyat yang selama ini telah melayani usaha mikro dan kecil semakin dirasakan penting khususnya sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa pelayanan kepada UMKM tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai dengan nasabah yang dilayani (UMKM) yaitu prosedur yang sederhana, dan waktu pemrosesan yang singkat. Namun demikian, peran Bank Perkreditan Rakyat dalam pembiayaan UMKM tersebut masih menempati porsi yang relatif kecil dibandingkan pembiayaan UMKM oleh bank umum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Bank Perkreditan Rakyat yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan didalam memberikan pelayanan kepada UMKM. Operasional Bank Perkreditan Rakyat belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai. Hal tersebut menyebabkan inefi-

siensi dan lemahnya aspek pengendalian (*control*) terhadap pengelolaan usaha BPR.

PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari dua sampel Bank Perkreditan Rakyat yang diambil semua memilih lokasi yang berdekatan dengan pasar atau kegiatan ekonomi yang ada di wilayah kecamatan. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, baik ditingkat manajerial maupun teknis operasional menyebabkan tingginya biaya overhead dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat. Tingginya tingkat suku bunga kredit Bank Perkreditan Rakyat yang disebabkan oleh biaya overhead bersama-sama dengan biaya dana (*cost of funds*), ternyata bukanlah merupakan kendala yang berarti bagi para debitur Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini terbukti dengan besarnya peningkatan jumlah debitur pada Bank Perkreditan Rakyat sampel selama 2 (dua) tahun terakhir. Terdapat kecenderungan berubahnya perilaku nasabah Bank Perkreditan Rakyat yang bersifat emotional market yaitu nasabah loyal yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Bank Perkreditan Rakyat karena adanya kesesuaian karakteristik sosial menjadi rational market yang lebih memperhitungkan untung rugi dalam bertransaksi dengan Bank Perkreditan Rakyat. Hal tersebut mendorong meningkatnya persaingan baik antar Bank Perkreditan Rakyat maupun dengan bank umum sehingga semakin menyulitkan Bank Perkreditan Rakyat dalam menghimpun dana dan mendorong semakin tingginya biaya dana (*cost of funds*) Bank Perkreditan Rakyat. Persaingan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat berasal dari sesama Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti BMT maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha kecil atau cabang di daerah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M.F., 2003. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Per-*

bankan). Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.

- Asrid Juniar dkk., 2005. *Analisis Kinerja Finansial Bank Umum Swasta di Indonesia*. Jurnal Informasi Teknik dan Niaga. Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun V, No. 2. November 2005.
- Asrid Juniar dkk., 2007. *Analisis Struktur Pasar dan Kinerja Industri Perbankan di Propinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 6, No. 1. April 2007.
- Asrid Juniar, 2007. *Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Industri Perbankan di Propinsi Kalimantan Selatan*. Hasil Penelitian Mandiri Tidak dipublikasikan.
- Bank Indonesia, 2003. *Direktori Perbankan Indonesia 2003*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta.
- Info Bank., 2003. *Sembilan Rasio Keuangan yang Menentukan Kinerja*. Info Bank. Nomor: 289 Volume XXV, Juni 17-21.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Laba A.R., dkk., 2003. *Bank Syariah, Potensi Preferensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan, kerjasama BI Makassar dengan LPM Unhas Makassar.
- Meina Wulansari Yusniar dkk., 2007. *Analisis Efisiensi Relatif Koperasi Simpan Pinjam di Propinsi Kalimantan Selatan dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 6, No. 3 Desember 2007.
- Mohd Khairuddin Hashim, et al., 2001. *Testing Environment as The Moderator Between Business Strategy-Performance Relationship: A Study of Malaysia SME's*. Journal of Small Business Management.
- Muljono, T.P., 1995. *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*. Cetakan Kelima, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Santoso T.B. dkk., 2000. *Peran Perbankan Sulawesi Tenggara dengan Diberlaku-*

kannya Otonomi Daerah. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Volume 3 No. 2.

Suhartono, 2002. *Pengaruh Kompetisi Bidang Fungsional terhadap Strategi Bisnis dan Kinerja Perbankan di Indonesia.* Disertasi tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.